

ABSTRAK
PENYELUNDUPAN HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG

Penyelundupan hukum adalah tindakan yang menghindari akibat hukum tertentu atau untuk menyebabkan suatu akibat hukum tertentu. Penyelundupan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus memperhatikan tugas, kewajiban, wewenang, serta tanggung jawabnya. Adanya UUJN dan Kode Etik Notaris adalah untuk menjaga pelaksanaan profesi Notaris berjalan dengan baik. Namun seringkali oknum Notaris melakukan penyelundupan hukum, seperti membuat utang piutang menjadi perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk penyelundupan hukum dalam praktik utang piutang serta bagaimana keabsahan dan tanggung jawab Notaris terhadap akta PPJB yang dibuat sebagai penyelundupan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penyelundupan hukum pembuatan PPJB yang dilakukan oleh Notaris serta untuk mengetahui keabsahan akta dan tanggung jawab hukum Notaris atas akta PPJB yang dibuat sebagai penyelundupan hukum dalam utang piutang.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Sumber dan jenis data yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan, serta teknik analisis data kualitatif.

Utang piutang berbeda dengan PPJB, utang piutang merupakan pinjam meminjam sedangkan PPJB adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan jual beli di kemudian hari. Utang piutang dan PPJB memiliki dasar hukum, konsep, prosedur, dan akibat hukum yang berbeda. Sehingga utang piutang tidak bisa dibuat kedalam bentuk PPJB dan apabila tetap dilakukan maka hal ini termasuk kedalam suatu bentuk penyelundupan hukum yang tidak sah dan merugikan debitur sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Notaris sesuai dengan ketentuan dalam UUJN.

Bentuk penyelundupan hukum dalam utang piutang adalah dibuatnya utang piutang menjadi PPJB. PPJB berbeda dengan utang piutang sehingga jika utang piutang dibuat jadi PPJB maka PPJB tersebut tidak sah dan tidak memiliki kepastian hukum serta merugikan debitur sehingga Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan UU dan Kode Etik.

Kata Kunci : Penyelundupan Hukum, PPJB, Utang Piutang

ABSTRACT
***EVASION OF LAW OF BINDING SALE AND PURCHASE AGREEMENTS
IN THE PRACTICE OF ACCOUNTS RECEIVABLE***

Evasion of law is an act to avoids a particular legal effect or to cause a specific legal effect. Evasion of law can be done by anyone, including Notaries as officials authorized to make authentic deeds. Notaries in carrying out their duties must pay attention to their duties, obligations, authorities, and responsibilities. The existence of Notary Department Law and Notary Code of Ethics is to maintain the implementation of the Notary profession running well. However, Notaries often carry out evasion of law, such as making receivables into a sale and purchase binding agreement (PPJB).

So the problem is what is the form of evasion in the practice of receivables and how is the validity and responsibility of Notaries for it. The purposes of this study is to determine the form of evasion of law carried out by Notaries and to find out the validity of deeds and legal responsibilities of Notaries for binding agreements deeds made as evasion of law in accounts receivable.

The method used is empirical juridical with descriptive-analytical research specifications. The sources and types of data are primary and secondary data, with data collection techniques through field studies and literature, as well as qualitative data analysis techniques.

Receivables payable about borrowing while binding agreement is an agreement between the seller and buyer to carry out the sale and purchase in the future. Receivables payable and binding agreement have different legal bases, concepts, procedures, and legal consequences. So it cannot be made into the form of PPJB. If it's still done, then it's included in a form of evasion of law and is not valid and harms the debtor so Notary can be held accountable.

The form of evasion in accounts receivable is the creation of receivables payables into binding agreement which different from receivable debt, so if the receivable debt is made into binding agreement, it's invalid and has no legal certainty and the Notary can be held accountable.

Keywords : Evasion of Law, PPJB, Accounts Receivable